

SOCIAL CAPITAL REDLINE FIELD OUTREACH (PL) IN REACHING OUT TO WOMEN SEX WORKERS (PSP)

Rachmawati Nur Syahira

Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam
Negeri Kediri, Jl. Sunan Ampel No. 7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur,
Indonesia 64127

Rahmaasyy03@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of social capital in outreach efforts to Female Sex Workers (FSWs) by Field Outreach Workers (FOWs) from the Redline Indonesia NGO for the prevention and control of HIV/AIDS in East Java. Social capital includes norms, social networks, and trust, which FOWs utilize to approach FSWs, particularly after the government's closure of brothel areas. Using a qualitative method with a phenomenological approach, this research explores the experiences of FOWs in several districts, such as Kediri, Nganjuk, Jombang, and Madiun. The findings reveal that a social capital-based approach—through the application of positive values, network-building with stakeholders (such as community health centers and key figures), and trust-building with FSWs—is effective in increasing FSW participation in health screenings. This success is supported by a continuous, empathy-based approach that helps overcome stigma and fosters greater involvement from FSWs in health programs.

Keywords: Social Capital, Field Outreach Workers, Female Sex Workers

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran modal sosial dalam upaya penjangkauan Pekerja Seks Perempuan (PSP) oleh Penjangkau Lapangan (PL) dari Yayasan Redline Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur. Modal sosial yang dimaksud meliputi norma, jaringan sosial, dan kepercayaan yang akan dimanfaatkan Penjangkau Lapangan (PL) dalam mendekati populasi kunci di berbagai wilayah, terutama setelah penutupan lokalisasi secara serentak oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman Penjangkau Lapangan (PL) dalam menjangkau PSP di beberapa distrik di Jawa Timur seperti Kediri, Nganjuk, Jombang, dan Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis modal sosial, seperti pemanfaatan norma dan nilai positif, pembangunan jaringan dengan pihak terkait (Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan tokoh kunci), serta upaya membangun kepercayaan dengan PSP, terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi PSP dalam pemeriksaan kesehatan. Keberhasilan ini didukung oleh pendekatan berkelanjutan dan pendekatan berbasis empati, yang membantu mengatasi stigma dan keraguan di kalangan Pekerja Seks Perempuan (PSP).

Kata kunci: Modal sosial, Penjangkau Lapangan, Pekerja Seks Perempuan

PENDAHULUAN

Fenomena prostitusi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik era terdahulu hingga sekarang. Eksisnya prakti prostitusi hingga saat ini menunjukkan bahwa masih banyaknya peminat dan pengguna jasa seksual hingga sekarang. Menurut Jarvinen (dalam Yastri dan Ratriana, 2019) fenomena ini dipandang sebagai fenomena “alami” dan “universal” dalam masyarakat serta dianggap sebagai pekerjaan perempuan paling tua di dunia. Bagaimana praktik prostitusi bisa muncul dan sejak kapan bermulanya praktik ini masih simpang siur diperdebatkan oleh para ahli. Di

Indonesia sendiri praktik ini tidak dapat dipisahkan dari praktik pergundikan zaman kolonial, dimana saat itu pemerintahan Belanda secara gencar memaksa perempuan pribumi untuk menjadi gundik. Menurut Ingelson (dalam Mahardika, 2020) perluasan perkebunan di Jawa Barat, peningkatan industri gula di Jawa Tengah dan Jawa timur, serta pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan setiap daerah hingga ke kota-kota kecil melahirkan lokalisasi-lokalisasi tempat prostitusi, salah satu yang terbesar adalah Lokalisasi Dolly. Pembangunan jalan dan jalur kereta api tersebut menyebabkan migrasi pekerja laki-laki besar-besaran,

Rachmawati Nur Syahira: Modal Sosial Penjangkau Lapangan (PL) Redline Dalam Menjangkau Pekerja Seks Perempuan

sehingga untuk memuaskan nafsu mereka didirikanlah lokalisasi-lokalisasi tersebut.

Berbeda dengan masa tersebut, praktik prostitusi sekarang ini sebagian besar bukan dilakukan akibat pemaksaan dari orang lain. Dijelaskan oleh Kollinsky dkk. (dalam Nur dan Bayu, 2024), bahwa penyebab sebagian besar seseorang terjun menjadi pekerja seks adalah kemiskinan yang bersifat struktural. Kebijakan yang tidak memihak pada kaum lemah menjadikan yang miskin semakin miskin, sehingga kaum miskin perempuan terkadang tidak memiliki pilihan selain bekerja di dunia prostitusi. Perempuan-perempuan yang menyediakan jasanya untuk melakukan aktivitas seksual sebagai mata pencahariannya dapat disebut dengan PSP (Pekerja Seks Perempuan). Istilah PSP juga digunakan oleh IAC (Indonesia AIDS Coalition) sebuah organisasi yang bergerak menangani AIDS sebagai salah satu populasi kunci yang rentan terhadap penularan HIV dan memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan terkait HIV-AIDS. Sebagai populasi kunci yang berisiko tinggi terkena dan menularkan virus HIV, PSP (Pekerja Seks Perempuan) tentunya perlu mendapat perhatian lebih sebagai usaha penanganan isu HIV di masyarakat.

Berdasarkan data dari SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS) milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, estimasi ODHIV (Orang dengan HIV) di Jawa Timur per tanggal 23 November tahun 2023 mencapai 65.238 penyintas, sedangkan ODHIV yang telah ditemukan dari tahun 1987 hingga 2023 jumlahnya mencapai 97.431 penyintas. Sedangkan penemuan ODHIV baru dari bulan Januari hingga November 2023 mencapai 9.409 penyintas, atau hampir 10.000 orang ditemukan terinfeksi HIV belum genap setahun. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astha Triyno, penularan virus HIV ini sebenarnya cukup sulit dan hanya dua orang yang mungkin untuk tertular, yaitu orang yang berhubungan seks berisiko dan orang yang menggunakan narkoba suntik dengan cara berbagi jarum dengan penyintas. Kekhususan cara

penyebaran dan daya tahan virus HIV yang lemah diluar tubuh tampaknya bertolak belakang dengan cepatnya penyebaran virus dari individu ke individu lain. Dengan begitu, perlu adanya penjangkauan berbasis edukasi dan layanan kesehatan kepada masyarakat terutama populasi kunci untuk menangani masalah tersebut.

Salah satu lembaga yang ikut andil dalam isu HIV/AIDS di Jawa Timur adalah Redline Indonesia. Redline merupakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) prodemokrasi yang bertugas mengedukasi dan menjangkau kelompok atau komunitas yang berisiko tinggi terinfeksi HIV, salah satunya ialah komunitas PSP (Pekerja Seks Perempuan). Dalam lembaga Redline terdapat istilah yang disebut PL (Penjangkau Lapangan) yang akan bekerjasama dengan beberapa pihak dan melakukan edukasi serta mengajak tes HIV terhadap PSP (Pekerja Seks Perempuan)

yang tersebar di berbagai daerah seperti Kediri, Nganjuk, Jombang, dan Madiun. Untuk mengedukasi dan melakukan tes tersebut tentu diperlukan penjangkauan dan pendekatan dengan PSP (Pekerja Seks Perempuan), yang memungkinkan menghadapi PL (Penjangkau Lapangan) kepada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi.

Salah satu tantangannya yaitu ditutupnya lokalisasi secara serentak di Jawa Timur dan beberapa kota-kota besar lainnya. Penutupan lokalisasi di Jawa timur ini berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi, serta Human Trafficking. Penutupan lokalisasi tersebut tidak semata-mata menghilangkan praktik prostitusi di masyarakat. Praktik tersebut tetap ada dan tersebar ke tempat-tempat yang lebih tertutup bahkan beralih menjadi prostitusi online, dimana hal tersebut membuat para PSP (Pekerja Seks Perempuan) tersebut justru lebih sulit dijangkau yang mengakibatkan penyebaran HIV jadi tidak terkendali. Untuk tetap dapat menjangkau para PSP

Rachmawati Nur Syahira: Modal Sosial Penjangkau Lapangan (PL) Redline Dalam Menjangkau Pekerja Seks Perempuan

(Pekerja Seks Perempuan) tersebut, PL (Penjangkau Lapangan) perlu memiliki teknik dan keterampilan untuk mencapai targetnya yaitu mengajak tes HIV untuk populasi tersebut. Salah satunya adalah dengan memiliki modal sosial yang memumpuni.

Menurut Woolcock (1998) modal sosial diartikan sebagai derajat kohesi sosial yang berada dalam komunitas berdasarkan acuan pada proses-proses antar individu dalam membangun jaringan, norma-norma, kepercayaan sosial, dan kelancaran koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan menurut Lang dan Hornburg (1998), modal sosial diartikan sebagai ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat (stocks of social trust), norma-norma, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bersama (Rusydan, 2019). Modal sosial diartikan Putman (1993) sebagai institusi sosial melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama.

Lebih jauh Williams (2008) mengartikan jaringan sosial sebagai hubungan sosial yang diikat oleh kepercayaan yang kemudian dipelihara melalui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan sosial ini bersumber dari beberapa faktor yaitu: informasi, persahabatan, waktu, uang, hubungan bisnis, dukungan sosial, dan dukungan emosional. Kemudian Bicchieri (2018) mengartikan norma sebagai aturan atau paham yang berlaku di masyarakat mengenai apakah suatu tindakan pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. Individu

yang merupakan bagian dari suatu masyarakat memiliki kewajiban mematuhi norma yang berlaku sehingga kelanggengan sistem sosial tercapai. Sedangkan Szklarek & Biglieri (2016) berpendapat kepercayaan yang tinggi berkontribusi memberikan kemudahan bagi individu atau kelompok dalam mengakses berbagai hal seperti: pekerjaan, pengetahuan, informasi, dan

faktor ekonomi atau dengan kata lain mendatangkan keuntungan secara ekonomi (Wuryanti U., dkk., 2020).

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa modal sosial merupakan kumpulan unsur-unsur sosial seperti norma sosial, jaringan sosial, dan kepercayaan sosial yang digunakan individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal menjangkau populasi kunci, modal sosial dibutuhkan oleh PL (Penjangkau Lapangan) untuk mencapai tujuannya, yaitu mengedukasi dan menjangkau sebagai bentuk pencegahan virus HIV. Dalam proses penjangkauan, membangun jaringan sosial dan kepercayaan menjadi sangat penting untuk menjalin kedekatan dengan populasi kunci. Sebelum itu, norma dan nilai merupakan pra-kondisi dan pondasi awal terbentuknya kepercayaan antar individu yang terlibat (Fukuyama, dalam Rusydan, 2019).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas ataupun keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan, melalui pendekatan kuantitatif (Suryono, dalam Nasution, 2023). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, studi yang mencoba mencari jawaban mengenai makna dari suatu fenomena. Menurut Stephen (2002) pendekatan fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar (Nasution, 2023)

Pendekatan fenomenologi menjadi pilihan dengan pertimbangan, penelitian ini berupaya untuk mengungkap fenomena modal sosial yang dimiliki dan diterapkan PL (Pendamping Lapangan) dalam menjangkau PSP (Pekerja Seks Perempuan). Subjek penelitian ini adalah PL (Penjangkau Lapangan) yang bekerja di Yayasan Redline Indonesia yang tersebar di beberapa distrik di Jawa

Rachmawati Nur Syahira: Modal Sosial Penjangkau Lapangan (PL) Redline Dalam Menjangkau Pekerja Seks Perempuan

Timur, yaitu Kota Kediri, Nganjuk, Jombang, dan Madiun. PL (Penjangkau Lapangan) ini bertugas menjangkau populasi kunci dalam hal ini adalah PSP (Pekerja Seks Perempuan) untuk diberikan edukasi dan diajak untuk melakukan kesehatan reproduksi.

Rachmawati Nur Syahira: Modal Sosial Penjangkau Lapangan (PL) Redline Dalam Menjangkau Pekerja Seks Perempuan

HASIL

Redline Indonesia memiliki dua Program Penjangkauan, yaitu Program LSL (Laki Seks Laki) dan PSP (Pekerja Seks Perempuan) sebagai populasi kuncinya. Untuk Program PSP (Pekerja Seks Perempuan) penjangkauan dilakukan di beberapa distrik, yaitu Kota Kediri, Nganjuk, Jombang, dan Madiun. Di setiap distrik terdapat PL (Penjangkau Lapangan) yang bertugas, yaitu tiga PL di distrik Kota Kediri, satu PL di distrik Nganjuk, satu PL di distrik Jombang, dua PL di distrik Madiun, dan satu KL (Koordinasi Lapangan). Total PL (Penjangkau Lapangan) pada saat ini sekitar delapan orang. Penjangkauan biasanya dilakukan dengan beberapa cara, seperti mobile ataupun door to door. Mobile biasanya dilakukan dengan cara mendatangi hotspot yang sudah ditentukan secara langsung untuk dilakukan edukasi dan tes, sedangkan door to door adalah penjangkauan yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan penjangkauan ini melibatkan beberapa pihak seperti Dinkes, Puskesmas, KPA (Komisi Penanggulangan AIDS), tokoh kunci (penanggungjawab tempat PSP bekerja), dan lain-lain. Penentuan hotspot biasanya dipilih berdasarkan lokasi mana kira-kira yang berpotensi menjadi tempat PSP (Pekerja Seks Perempuan) melakukan aktivitas kerjanya. Penutupan lokalisasi secara serentak berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2010 tanggal 30 November 2010 membuat lokasi PSP (Pekerja Seks Perempuan) berkumpul menjadi tersebar dan tidak pasti, sehingga penjangkauan dilakukan di tempat-tempat yang paling berpotensi setelah lokalisasi, seperti ekslokalisasi, kos-kosan, cafe-cafe, dan warung.

Akibat penutupan lokalisasi secara serentak di Jawa Timur, diperlukan usaha dan keterampilan ekstra untuk tetap dapat menjangkau populasi kunci. Salah satunya dengan cara memiliki modal sosial yang baik. Modal sosial dalam hal ini merupakan kemampuan dan sumber daya sosial yang dimiliki PL (Penjangkau Lapangan) yang

dimanfaatkan untuk mengedukasi dan menjangkau lebih banyak populasi kunci. Dari sudut pandang populasi kunci, PL (Penjangkau Lapangan) memahami bahwa percaya kepada orang asing untuk diajak melakukan tes HIV bukanlah hal yang mudah. Sehingga dari sini PL (Penjangkau Lapangan) perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu hingga akhirnya populasi kunci tergerak untuk melakukan tes.

Menurut subjek tidak ada skill khusus yang perlu dimiliki untuk berkomunikasi dengan mbak-mbak PSP (Pekerja Seks Perempuan), cukup hanya berbicara dengan sopan dan tidak menyinggung atau merendahkan. "Nggak ada spesifikasi khusus sih, hanya cara berbicara yang sopan, tidak menyinggung/merendahkan mereka", terang subjek.

Dalam proses pendekatan posisikan diri sama sebagai sesama manusia, merangkul, sehingga ketika mbak-mbaknya merasa nyaman akan terbuka secara sendirinya. Kemudian menyelaraskan waktu dengan jam kerja PSP, pendekatan biasanya dilakukan pada malam hari dengan cara mengobrol santai di warung-warung tempat PSP beraktivitas yang pada dasarnya obrolan tersebut mengarah pada edukasi dan ajakan untuk melakukan tes kesehatan reproduksi. Edukasi dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh PSP serta memberikan contoh nyata untuk meningkatkan kesadaran bahwa pekerjaan mereka beresiko tinggi tertular HIV. Penjangkau Lapangan juga meyakinkan dan mengusahakan kerahasiaan data pribadi PSP sehingga mengurangi keraguan untuk mengikuti tes kesehatan reproduksi.

Sebelum melaksanakan kegiatan mobile atau door to door, PL (Penjangkau Lapangan) perlu bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti beberapa Puskesmas di daerah distrik, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Dinas Kesehatan, tokoh kunci, 'mami' (muncikari), dan lain-lain. Penjangkau Lapangan perlu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak tersebut untuk mencapai tujuan bersama, yaitu

Rachmawati Nur Syahira: Modal Sosial Penjangkau Lapangan (PL) Redline Dalam Menjangkau Pekerja Seks Perempuan

mengedukasi dan menjangkau populasi kunci sebagai pencegahan penyebaran HIV.

Untuk membangun kepercayaan, pendekatan tidak hanya dilakukan sekalidukasi. Penjangkau Lapangan datang beberapa kali dengan kedok mengopi untuk mendekati dan mengedukasi secara bertahap. Menurut subjek semakin sering frekuensi kedatangan ke tempat tersebut, maka semakin percaya pula PSP tersebut kepada PL. Di lapangan terdapat beberapa PSP yang ragu dan menolak diajak tes, untuk mengatasinya Penjangkau Lapangan meminta bantuan kepada tokoh kunci atau penanggung jawab ekslokalisasi untuk memperkenalkan PL bahwa niat kedatangannya baik. Melalui 'orang dalam' yang telah dikenal PSP sebelumnya, membuat PSP semakin percaya terhadap PL (Penjangkau Lapangan) akan niat baiknya. Kemudian kedatangan pihak Puskesmas dan adanya pembagian "kondom" secara gratis dapat meyakinkan PSP bahwa tes tersebut benar-benar dilakukan untuk kebaikannya dan tidak ada unsur menipu. Fasilitas yang biasanya perlu biaya mahal untuk mendapatkannya, bisa didapatkan PSP dengan gratis melalui program penjangkauan ini. Bahkan menurut pengakuan subjek, beberapa dari mereka antusias ketika ada kegiatan mobile bersama PL (Penjangkau Lapangan) yang mengedukasi dan menjangkau mereka selama ini.

Memiliki jiwa sosial yang tinggi diperlukan dalam pekerjaan ini. Kebanyakan PSP saat pertama kali mengetahui bahwa dirinya positif HIV memiliki perasaan takut dan malu. Ketakutan tersebut diakibatkan karena apabila lingkungan sekitar mengetahuinya maka kemungkinan besar akan dikucilkan. Sehingga, ketika awal positif PL (Pendamping Lapangan) akan mendampingi berobat secara rutin meskipun tidak masuk capaian. Sesuai pernyataan subjek, "Kebanyakan kalau tau pertama positif biasanya malu, jadi perlu didampingi. "Ayo mbak tak temani, gausah malu nggakpapa, rahasiane

saman terjaga kok" jelas subjek. Subjek mengungkapkan bahwa Penjangkau Lapangan yang baik adalah yang bekerja menggunakan hati nurani dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. "Jadi sekali bekerja dapat uang iya, dapat pahala juga iya", terang subjek.

PEMBAHASAN

Modal sosial ini diketahui sebagai modal yang perlu dimiliki PL (Penjangkau Lapangan) yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam proses menjangkau populasi kunci. Pekerjaan PL (Penjangkau Lapangan) merupakan pekerjaan yang memaksa bekerjasama dan membangun hubungan yang kooperatif dalam proses kerjanya. Keselarasan dengan pihak terkait (Puskesmas, Dinkes, tokoh kunci) serta menjalin hubungan yang kooperatif dengan populasi kunci merupakan kondisi yang perlu diusahakan untuk mencapai tujuan bersama. Modal seperti norma, kepercayaan, dan jaringan sosial sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut Menurut Putnam (dalam Thomas, 2020) sifat-sifat sosial seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan sosial dapat memperbaiki efisiensi masyarakat jika disertai dengan koordinasi yang baik. Dalam hal ini, dengan memanfaatkan ketiga modal tersebut akan meningkatkan efisiensi bekerja PL (Penjangkau Lapangan) dalam menjangkau populasi kunci apabila modal-modal tersebut dikoordinasikan dengan baik.

Modal sosial berupa norma-norma merujuk pada nilai atau panduan yang dipegang PL (Penjangkau Lapangan) dalam menjalankan tugasnya. Norma kesesuaian yang dipegang seperti "berbicara yang sopan dan jangan menyinggung perasaan mbak-mbaknya" nyatanya berhasil menjadi modal PL (Penjangkau Lapangan) agar dibukakan pintu masuk kedalam lingkungan PSP bahkan disambut dengan baik. Sesuai dengan definisi Bank Dunia (dalam Thomas, 2020) tentang modal sosial adalah lembaga, hubungan, dan norma-norma yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas interaksi antar individu atau kelompok di masyarakat.

Rachmawati Nur Syahira: Modal Sosial Penjangkau Lapangan (PL) Redline Dalam Menjangkau Pekerja Seks Perempuan

Norma yang membuat PSP merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik membuat mereka mau membuka diri dan berinteraksi dengan PL (Penjangkau Lapangan), hal tersebutlah yang membuktikan bahwa norma mempengaruhi kualitas hubungan antara keduanya. Selain itu, nilai berupa kepercayaan bahwa semua manusia itu sama dan pantas mendapatkan hak yang sama membuat PL (Penjangkau Lapangan) memosisikan diri sama seperti PSP, membuat PL (Pendamping Lapangan) berusaha agar PSP ini mendapatkan edukasi dan menjaga kesehatannya. Kesadaran bahwa tugasnya merupakan tugas sosial yang melibatkan hati nurani dan jiwa sosial yang tinggi, berbanding searah dengan nilai yang dipegang PL, yaitu bekerja dengan tujuan mendapatkan penghasilan sekaligus mendapatkan pahala. Nilai tersebut mendorong PL (pendamping Lapangan) untuk menolong dan mendampingi PSP untuk rutin berobat meskipun itu bukanlah tugasnya. Waktu dan tenaga yang dikorbankan PL (Penjangkau Lapangan) untuk mendampingi PSP meningkatkan kepercayaan dan kedekatan antara PL dengan PSP. Searah dengan pendapat Haridison (dalam Rusydan, 2019) norma preskriptif yang merupakan bentuk modal sosial sangat penting dalam kolektivitas adalah norma yang membuat seseorang melepaskan kepentingan diri sendiri untuk bertindak demi kepentingan kolektivitas.

Jaringan sosial diperlukan untuk menjangkau populasi kunci secara lebih luas. Pasca lokalisasi tempat PSP bekerja juga ditutup secara massal, keberadaan mereka menjadi menyebar dan tidak pasti dimana tempat mereka berkumpul. Selain itu, populasi kunci PSP juga termasuk kelompok marginal dimana keberadaan mereka cenderung dipinggirkan dan didiskriminasi oleh masyarakat. Sejalan dengan temuan Gilang dan Syukur (2024) yang menemukan bahwa masyarakat di Jalan Nusantara, Kota Makassar seringkali menunjukkan sikap penolakan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil terhadap remaja pekerja seks

komersial, stigma negatif yang didapatkan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik, mental, bahkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Hal tersebut membuat mereka tertutup dan mengisolasi diri terhadap dunia luar yang cenderung menghakimi keberadaan mereka. Dari pernyataan tersebut, maka dibutuhkan jaringan sosial untuk memudahkan PL (Penjangkau Lapangan) untuk lebih cepat mendapatkan informasi mengenai populasi kunci untuk dijangkau. Temuan tersebut juga didukung oleh pendapat Putman (2000), jaringan sosial merupakan salah satu modal sosial yang juga berperan sebagai saluran mengalirnya informasi berguna yang menunjang keberhasilan usaha mencapai tujuan (Thomas, 2020). Melibatkan tokoh kunci dalam menjangkau PSP (Pekerja Seks Perempuan) ternyata cukup efektif untuk mendapatkan kepercayaan PSP untuk diajak melakukan tes. Tokoh kunci merupakan orang yang telah dikenal PSP dan merupakan penanggungjawab tempat kerja mereka, sehingga menjangkau PSP melalui orang yang telah mereka kenal dapat meningkatkan keyakinan mereka bahwa tes yang dilakukan benar-benar bukan penipuan. Fukuyama (2002) menjelaskan bahwa pertukaran informasi yang diwadahi oleh jaringan untuk berinteraksi berkontribusi memunculkan kepercayaan antara individu yang terlibat (Rusydan, 2019).

Membangun kepercayaan PSP merupakan hal yang krusial dalam program penjangkauan ini. Pendekatan dilakukan PL (Penjangkau Lapangan) tidak hanya sekali-duakali, semakin sering frekuensi kedatangan ke lokasi maka semakin tinggi pula kepercayaan PSP. Kemudian menyediakan fasilitas kesehatan resmi seperti layanan Puskesmas dan pemberian "kondom" secara gratis juga mempengaruhi kepercayaan PSP, yang biasanya mereka perlu mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk mendapatkan fasilitas tersebut, mereka bisa mendapatkan fasilitas tersebut secara gratis melalui program penjangkauan ini. Dengan

Rachmawati Nur Syahira: Modal Sosial Penjangkau Lapangan (PL) Redline Dalam Menjangkau Pekerja Seks Perempuan

usaha-usaha membuat PSP menjadi kooperatif dengan PL (Penjangkau Lapangan) dan bersedia berpartisipasi bahkan antusias untuk melakukan tes. Sejalan dengan pendapat Cox (1995) kepercayaan sosial yang tinggi dalam masyarakat cenderung memiliki aturanaturan sosial bersifat positif dan pada akhirnya terbentuk hubungan-hubungan kerjasama yang baik pula. Lebih lanjut lagi Fukuyama (dalam Rusydan, 2019) menjelaskan bahwa kepercayaan menyangkut hubungan timbal balik. Bila masing-masing pihak memiliki harapan yang sama-sama terpenuhi oleh satu sama lain, maka tingkat kepercayaan yang tinggi akan terwujud. Ketika harapan PSP untuk diperhatikan dengan cara diberikan edukasi dan fasilitas kesehatan secara gratis terpenuhi, dan harapan PL agar PSP bersedia kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka kepercayaan dan kohesivitas antara kedua pihak tersebut cenderung meningkat.

KESIMPULAN

Penutupan lokalisasi secara serentak menyebabkan Pekerja Seks Perempuan tidak memiliki tempat tetap untuk melakukan pekerjaannya. Meskipun lokalisasi sudah tidak ada, praktik prostitusi juga masih berlanjut hingga sekarang ini. Praktik tersebut masih dilakukan tersebar di wilayah-wilayah yang tidak pasti bahkan beralih ke dunia maya. Sehingga PSP sulit dijangkau untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai populasi yang berpotensi tinggi terkena dan menyebarkan virus HIV. Sebagai salah satu lembaga yang berusaha menjangkau populasi kunci seperti PSP (Pekerja Seks Perempuan) sebagai usaha pengendalian penyebaran HIV, Yayasan Redline Indonesia menugaskan PL (Penjangkau Lapangan) ke beberapa distrik kota. Adanya tantangan-tantangan dalam menjangkau populasi kunci PSP tersebut, maka urgent untuk para PL memiliki modal sosial yang baik. Modal sosial menurut Putman (1933) adalah institusi sosial melibatkan jaringan (networks), norma

norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Ditemukan dalam penelitian ini norma-norma yang dipegang PL (Penjangkau Lapangan) seperti menganggap semua orang sama dan tidak merendahkan orang lain, yang salam hal ini adalah PSP. PL (Penjangkau Lapangan) juga membangun jaringan sosial dengan beberapa pihak yang nantinya akan berpartisipasi dalam proses penjangkauan, seperti pihak Puskesmas, Dinas Kesehatan, tokoh kunci, hingga "mami" dari PSP yang menjadi target untuk dijangkau. Untuk membangun kepercayaan PSP untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, usaha yang dilakukan PL (Penjangkau Lapangan) dengan rutin melakukan pendekatan ke tempat PSP hingga melakukan pemantauan rutin kepada PSP yang positif HIV untuk terus mengonsumsi obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV Harfa Creative)
- Santoso T. (2020). Memahami Modal Sosial. (Surabaya: Pustaka Saga)
- Fathy Rusydan (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6 No. 1, hal. 1-173
- Mahardika M. D. G. (2020). Prostitusi di Surabaya Pada Akhir Abad Ke-19. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 14 No. 1, hal. 22-30
- Mauboy Y. H., Kusumiati R. Y. E. (2019). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Self-Esteem Pekerja Seks Komersial Yang Direhabilitasi. *Jurnal Psikologi Konseling*, Vol. 14 No. 1, hal. 419-230
- Septiansyah G., Syukur M. (2024). Stigma Masyarakat Terhadap Remaja Pekerja Seks Komersial Di Jalan Nusantara Kota Makassar. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, Vol. 4 No. 2 hal. 337-345
- Wuryanti U, Martono N. Mintarti (2020). Hubungan Status Sosial Ekonomi Dengan Modal Sosial Siswa Sma di Purwokerto. *Sosioglobal: Jurnal*

Rachmawati Nur Syahira: Modal Sosial Penjangkau Lapangan (PL) Redline Dalam Menjangkau Pekerja Seks Perempuan

Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 5 No. 1, hal. 21-42
Dinas Kominfo Jawa Timur (4 Desember 2023). Kadinkes Jatim Sebut Estimasi ODHIV di Jawa Timur Ada 65.238 Orang. Diakses pada 20 November 2024, dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kadinkes-jatim-sebut-estimasi-odhiv-di-jawa-timur-ada-65-238-orang>

Indonesian AIDS Coalition (31 Juli 2023). FGD Pengembangan KIE Penjangkauan HIV bagi Populasi Kunci PSP. Diakses pada tanggal 20 November 2024 DOI: <https://iac.or.id/fgdpengembangan-kie-penjangkauanhiv-bagi-populasi-kunci-ppsp/>